

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 1-15 NOVEMBER 2024

■ Varia Senat

**BULD DPD RI Tetapkan
Sasaran Pemantauan Perda**

■ Sekretariat Jenderal

**DPD RI Sosialisasikan
Tata Kelola JDIH di Riau**

■ Wisata

**Empat Destinasi Paling Dicari
di Kota Pahlawan Surabaya**

*Four Most-Sought-After Destination
in Heroes City Surabaya*

**DPD RI SIAP
BERKOLABORASI
DENGAN PEMERINTAH**

**Harus Merasa Bangga Jadi
Bangsa Indonesia**

**SCAN
ME!**

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia



SENAT UTAMA

04



- DPD RI Siap Berkolaborasi Dengan Pemerintah
- Kolaborasi DPD RI dan Pemerintah Percepat Pembangunan di Daerah
- Lima Tantangan Pemerintahan Prabowo
- DPD RI Siap Dukung Pemerintahan Prabowo
- Pemerintahan Prabowo Diharapkan Membawa Kebijakan yang Adil

NUSANTARA

09

- Harus Merasa Bangga Jadi Bangsa Indonesia
- DPRP Jalur Otsus Belum Dilantik, LMA Papua Mengadu ke DPD RI
- Senator Miliki Misi Diplomatik Perkenalkan Potensi Daerah
- Komite III DPD RI Minta Keadilan untuk Supriyani
- Pemerintah Perlu Antisipasi Potensi Konflik Pilkada 2024
- Senator Erni Daryanti Minta Pengawasan *Skincare* Diperketat
- Program Transmigrasi Bukan Solusi Atasi Kesejahteraan Masyarakat Papua
- Membangun Kerja Sama Tim Anggota DPD RI Ikuti *Outbound*
- Program Makan Bergizi Gratis Sangat Penting dan Mendesak
- DPD RI Terima IHPS Tahun 2024 dari BPK RI

VARIA SENAT

22

- BULD DPD RI Tetapkan Sasaran Pemantauan Perda
- BKSAP Tindaklanjuti LoI dengan Ceko Soal Perlindungan Lingkungan Hidup
- Audiensi ke Komite III, KTKI Adukan Kemenkes

SEKRETARIAT JENDERAL

26

- DPD RI Sosialisasikan Tata Kelola JDIH di Riau

GALERI FOTO

27



GAGASAN

28

- Memahami Kepemimpinan Presiden Prabowo

WISATA

30

- Empat Destinasi Paling Dicari di Kota Pahlawan Surabaya
Four Most-Sought-After Destination in Heroes City Surabaya





Kolaborasi dan Pembangunan Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyatakan ke-siapan DPD RI bersinergi dengan pemerin-tahan Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia yang adil dan merata. Sebagai wakil daerah, DPD RI siap memperjuangkan aspirasi konstituen di seluruh pelosok negeri. Sinergi ini sangat penting di tengah tantangan global dan domestik yang membutuhkan persatuan antar-pemangku kebijakan demi mencapai cita-cita bersama: bangsa yang makmur, berdaulat, dan merdeka.

Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah, mendorong kese-jjahteraan masyarakat, serta mengokohkan peran DPD RI sebagai lembaga legislatif yang berpihak pada daerah. Dengan menguatkan desentralisasi, memperjuangkan politik anggaran yang berkeadilan, serta mempererat kerja sama dengan pemerin-tah daerah, DPD RI dapat hadir nyata bagi masyarakat yang diwakilinya.

Untuk itu, DPD RI terus meningkatkan kapasitas advokasi dan respons terhad-pap isu-isu yang berdampak langsung bagi daerah. Dengan menjadi jembatan yang efektif antara pusat dan daerah, DPD RI dapat memperkokoh kepercayaan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

(* / Pemred)

Collaboration and Regional Development

The Chairman of House of Regional Development (DPD) RI, Sultan B. Najamudin affirms the readiness of DPD-RI to synergize with Prabowo – Gibran administration to develop a just and equitable Indonesia. As regional representative, DPD-RI is ready to strive for the aspiration of constituents from all over the country. The synergy is crucial in the face of global and domestic challenges which need uniformity among stakeholders in order to achieve the common goal: prosperous, sovereign and free nation.

The collaboration is expected to expediting regional development, boosting communities' prosperity, and strengthening the role of DPD RI as legislative institution whose action is on behalf of the regions. By promoting decentralization, striving for a justifiable budgetary politics, and strengthening cooperation with regional administration, DPD RI can appear real to the communities whom it represents.

Accordingly, DPD RI continues to improve its advocating capacity and response toward issues which have direct impact to the regions. By bridging effectively between the central and regional administration, DPD RI is capable to convince the trust of communities and become the vanguard in fighting for their aspirations. (/ Chief Editor)*



DPD RI SIAP BERKOLABORASI DENGAN PEMERINTAH



Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Bersama Kabinet Merah Putih yang dilantik Senin (21/10/2024), pemerintahan baru ini membawa harapan besar bagi masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang optimis terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan komitmen lembaga-nya untuk bersinergi dengan pemerintahan Prabowo dalam mempercepat pemerataan pembangunan. “Semangat kami adalah membangun Indonesia dari daerah, memperkuat kedaulatan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya dalam kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPD RI di Gedung Lemhannas RI, Senin (21/10/2024). Menurut Sultan, pemerataan pembangunan adalah elemen kunci untuk memperkuat pondasi negara dan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Nusantara.

Sultan juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang berani dan strategis dalam melakukan terobosan pemerintahan, terutama dalam memilih kabinetnya. Ia menilai bahwa Kabinet Merah Putih berisi putra-putri terbaik bangsa yang berkomitmen pada perubahan positif. “Pak Prabowo punya pendekatan yang saya kira sangat baik dalam menata pemerintahan yang tertib dan merekrut menteri-menteri berintegritas. Tidak tepat jika kita menyebut susunan kabinet ini ‘gemuk’ atau berlebihan,” tegas Sultan.

Senator dari Bengkulu ini juga menekankan bahwa komposisi kabinet yang solid dan profesional dapat berfungsi secara *auto-pilot*, membebaskan Presiden Prabowo untuk mengambil posisi strategis di panggung internasional. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kata Sultan, pemimpin Indonesia harus tampil sebagai penyeru perdamaian dan keadilan sosial. “Waktunya sudah tiba bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih berani dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan mengatasi ketimpangan global,” ujarnya penuh harap.

Lebih lanjut, Sultan menyebut bahwa kabinet Prabowo menggambarkan visi nasional yang inklusif,



(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

komprehensif, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. “Dengan tim yang kuat, kami yakin pemerintahan ini akan membawa stabilitas politik yang kokoh. Tujuan utamanya adalah memupuk persatuan dan kebangsaan di dalam negeri,” tutur Sultan. Stabilitas politik ini, menurutnya, akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global yang semakin dinamis.

Sultan juga menyinggung pentingnya seluruh tokoh bangsa untuk bekerja sama dalam mendukung transisi pemerintahan yang harmonis. “Tidak ada alasan bagi para pemimpin bangsa ini, baik ketua partai politik maupun tokoh ekonomi,

untuk tidak menginginkan kedamaian dan kemajuan bagi Indonesia,” katanya. Semua tokoh bangsa, kata Sultan, harus menanggalkan kepentingan pribadi demi terciptanya suasana demokrasi yang tenang dan stabil.

Sebagai penutup, Sultan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh politik nasional, untuk bersama-sama mengawal pemerintahan baru demi tercapainya Indonesia yang mandiri dan berdaulat. “Saatnya kita bersatu, bergotong-royong, dan menciptakan Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Bangsa ini harus tumbuh di atas kemandirian dan kedaulatannya sendiri,” pungkasnya. (*)

Kolaborasi DPD RI dan Pemerintah Percepat Pembangunan di Daerah



Tiga Wakil Ketua DPD RI dari kiri ke kanan: GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan harapannya agar terjalin kolaborasi strategis antara DPD RI dan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Kami ingin DPD RI dapat bekerja sama erat dengan pemerintah pusat untuk memacu pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air,” ujar GKR Hemas usai menghadiri pelantikan Presiden Prabowo di Gedung Nusantara, Jakarta,

Minggu (20/10/2024).

GKR Hemas juga memaparkan beberapa prioritas DPD RI ke depan. *Pertama*, mengembalikan marwah dan citra DPD RI sebagai lembaga legislatif yang berwibawa. “Sering saya tekankan, DPD RI harus benar-benar hadir dan fokus menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah. Ini langkah penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat,” tuturnya. *Kedua*, memperjuangkan agar kebijakan anggaran negara berpihak kepada daerah. GKR Hemas menegaskan, “Kami akan memastikan politik anggaran mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.”

Selain itu, GKR Hemas ingin memperkuat otonomi daerah melalui desentralisasi yang memungkinkan daerah mengelola sumber daya dan kebijakan lokalnya. “Otonomi yang kuat memungkinkan daerah mengoptimalkan potensi lokal dengan lebih mandiri dan responsif,” jelasnya. Sinergi dengan pemerintah daerah juga akan ditingkatkan untuk menangani berbagai isu di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Di bawah kepemimpinannya, DPD RI juga diharapkan dapat mengawasi kebijakan pemerintah dan menjalin komunikasi politik yang intens dengan pemerintah pusat. “Kami ingin DPD RI menjadi mitra strategis pemerintah,

Lima Tantangan Pemerintah Prabowo

untuk memastikan kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah,” ujar GKR Hemas. Kolaborasi erat antara DPD RI dan pemerintah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyambut positif visi Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah rakyat dengan pendekatan kuratif yang menysasar akar permasalahan jangka panjang, sementara tetap memperhatikan kebutuhan jangka pendek. “Pendekatan ini tidak hanya menolong masyarakat secara langsung, tetapi juga menjaga keberlanjutan bangsa,” kata Tamsil. Menurutnya, kombinasi pendekatan kuratif dan karitatif yang dirancang Prabowo akan mengatasi persoalan rakyat secara menyeluruh.

Presiden Prabowo juga dinilai berhasil menggambar peta jalan untuk mengatasi masalah bangsa dengan gotong royong dan kolaborasi. “Ini artinya Presiden ingin membangun pemerintahan yang solid, kompak, dan satu komando dari pusat hingga ke perangkat desa,” tambah Tamsil. Pemerintahan yang solid, menurutnya, adalah pemerintahan yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompok atau golongan tertentu. (*)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, menyatakan bahwa rakyat berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat bekerja lebih efektif dalam lima tahun ke depan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.

Menurutnya, periode ini sangat penting bagi Indonesia untuk memastikan tercapainya Visi Indonesia Maju 2045. Fahira memaparkan empat tantangan utama yang akan menjadi fokus pemerintah ke depan.

Pertama, mengenai kemandirian pangan. Fahira menekankan pentingnya Indonesia untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Produksi pangan dalam negeri dapat menstabilkan harga dan membuat pangan lebih terjangkau. Upaya ini mencakup pengembangan sektor pertanian yang kuat dan berkelanjutan dengan teknologi modern, serta dukungan kepada petani melalui subsidi, penyediaan benih dan pupuk berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.

Kedua, terkait pengentasan kemiskinan. Menu-

rut Fahira, peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan investasi, mendorong industri kreatif, teknologi, dan pariwisata. Selain itu, diperlukan regulasi upah yang berkeadilan untuk memastikan kesejahteraan pekerja.

Ketiga, ia menyoroti pentingnya keadilan ekologis dalam pembangunan nasional, di mana isu lingkungan harus menjadi prioritas. Fahira menyebutkan pengembangan energi terbarukan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai langkah konkret untuk menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Keempat, Fahira menggarisbawahi pentingnya memastikan rakyat sehat, cerdas, dan produktif. Hal ini membutuhkan layanan kesehatan yang andal,

perluasan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia.

Fahira berharap pendidikan yang tuntas dan berkualitas dapat diakses secara setara oleh seluruh rakyat demi menciptakan generasi yang produktif dan berdaya saing. (*)



Senator asal DK Jakarta Fahira Idris
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



DPD RI Siap Dukung Pemerintahan Prabowo

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2009-2016 Irman Gusman, optimistis bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membawa Indonesia maju dengan tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.



Anggota DPD RI Irman Gusman (Foto Doc.Ist)

Irman menyampaikan bahwa DPD RI sebagai lembaga representatif daerah siap mendukung pemerintahan baru ini dalam menguatkan pembangunan nasional. “Kami di DPD RI siap mendukung, terutama dalam memperjuangkan kepentingan daerah demi kemajuan yang merata di seluruh nusantara, termasuk Sumatera Barat,” ungkap Irman Gusman, Minggu (20/10/2024).

Ketua DPD RI periode 2019-2024, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga menyatakan bahwa pidato perdana Presiden Prabowo sesuai dengan visi misi yang ia kampanyekan pada Pemilu 2024, yang kini mem-

bawa harapan besar bagi rakyat Indonesia. Menurut LaNyalla, komitmen Prabowo untuk berpihak kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan optimisme yang nyata. “Presiden harus didukung penuh agar cita-cita tersebut terwujud,” kata LaNyalla yang merupakan anggota DPD RI dari Jawa Timur.



Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto LaNyalla Centre)

LaNyalla berharap para anggota kabinet dapat mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo secara konkret dalam kebijakan nasional. “Keberhasilan cita-cita presiden sangat bergantung pada kinerja kabinetnya. Saya berharap seluruh elemen bangsa bersatu dalam tekad memperkokoh kedaulatan negara menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks,” lanjutnya.

Dia juga menyatakan dukungan atas peta jalan Prabowo yang memprioritaskan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari strategi kedaulatan negara. Menurutnya, untuk mencapai kedaulatan negara,

dibutuhkan kerja sama, semangat kejuangan, dan kontribusi positif dari seluruh elemen bangsa. “Penting bagi kita untuk membangun kesadaran bersama demi mempertahankan kedaulatan,” tegasnya.



Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami. (Foto RRI)

Sementara itu, senator Alfiansyah Bustami, yang akrab disapa Komeng, menilai bahwa Presiden Prabowo memiliki visi untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa pasca-Pemilu. “Pak Prabowo benar-benar ingin menyatukan seluruh pihak yang kemarin mungkin berbeda dalam pilpres, kini bersatu untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Komeng.

Komeng juga mengapresiasi program swasembada pangan Prabowo yang dianggap realistis mengingat program lumbung pangan (*food estate*) sudah berjalan. Sebagai komedian, ia menambahkan permohonan agar Presiden Prabowo menetapkan Hari Komedi pada tanggal 27 September, bertepatan dengan kelahiran tokoh komedi Bing Slamet. (*)

Harus Merasa Bangga Jadi Bangsa Indonesia

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyatakan bahwa, sebagai anak bangsa, kita harus merasa bangga menjadi orang Indonesia. Hal ini merupakan modal penting dalam mewujudkan kemandirian nasional. Rasa bangga dan cinta sebagai bangsa Indonesia adalah doktrin kebangsaan yang harus terus ditanamkan kepada generasi bangsa, bahkan sejak baru dilahirkan dari rahim seorang ibu.

“**B**anyak anak muda Indonesia di luar negeri yang malu dan enggan mengakui jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Rasa rendah diri seperti ini tentu saja karena posisi dan martabat bangsa yang dianggap belum sejajar dengan negara-negara maju di dunia,” ungkap senator asal Bengkulu itu, pada acara Pemandapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi anggota DPD RI, di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Oleh karena itu, Sultan secara pribadi mendorong agar ke depan para pemimpin nasional, khususnya Presiden Prabowo Subianto, lebih sering tampil di panggung internasional menyampai-



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (ketiga dari kiri) didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung, serta Gubernur Lemhanas Ace Hasan Sadzily (kanan). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kan pesan perdamaian dan menjadi global player, agar harkat dan martabat bangsa Indonesia bisa terangkat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. “Kita ingin anak-anak Indonesia bangga mengatakan ‘I am Indonesian’ dalam pergaulan internasional,” ujar Sultan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi demografi yang luar biasa. Saat ini, banyak negara yang memberikan perhatian kepada Indonesia. Dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia akan menjadi negara maju. “*Your country will become a developed nation,*” kata Sultan, menirukan ucapan para sahabatnya dari beberapa negara.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Sadzily menyampaikan bahwa situasi global saat

ini tengah mengarah pada pertarungan geoekonomi yang ditandai dengan perang dagang antara kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan China. Semua negara kini sedang membangun ketahanan nasional dengan mewujudkan kemandirian ekonomi melalui kemandirian pangan, energi, bahkan kemandirian air.

Ace juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang kuat adalah salah satu syarat terwujudnya negara maju. Rasa cinta tanah air dapat dibuktikan dengan penolakan terhadap perilaku koruptif. “Insya Allah ke depan Lemhannas akan berkolaborasi dengan semua senator dari setiap daerah untuk bekerja sama membangun peradaban bangsa yang kuat dan mandiri,” kata Ace. (*)

DPRP Jalur Otsus Belum Dilantik, LMA Papua Mengadu ke DPD RI

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys

Raweyai menerima kunjungan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10/2024). Mereka mengeluhkan lamanya pelantikan anggota DPR Papua, anggota DPR Papua Barat, dan anggota DPR Papua Barat Daya jalur Otonomi Khusus (Otsus).

Ketua LMA Papua George Dedaida, berharap agar pelantikan anggota DPR Papua jalur Otsus bisa dilaksanakan pada November mendatang. DPR Papua jalur Otsus bergerak independen tanpa partai politik. Masyarakat sangat menantikan kerja-kerja dari DPR Papua jalur Otsus.

“Semoga pelantikan ini bisa secepatnya, paling lambat November 2024 sudah diangkat DPR jalur Otsus di Tanah Papua,” harap Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat itu.

Menanggapi keluhan tersebut, Yorrys berjanji akan segera menindaklanjutinya. “Semua aspirasi akan kita tampung secara objektif. Hal ini menjadi perhatian kami karena proses seleksi belum dapat dimulai tanpa adanya panitia seleksi. Aspirasi ini harus segera ditindaklanjuti dan paling lambat pada November 2024 Pansel harus su-



Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai memimpin pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Adat Papua. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dah terbentuk,” kata Yorrys.

Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma, mengharapkan Komite I DPD RI yang membidangi pemerintah-an dalam negeri untuk segera mengundang pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar DPRP bisa segera dilantik dan bekerja. “Saya berharap Komite I bisa segera memanggil pemerintah,” ujar Filep yang juga menjabat Ketua Komite III DPD RI itu.

Pada kesempatan itu, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengungkapkan bahwa komite yang dipimpinnya sudah menindaklanjuti aspirasi Lembaga Masyarakat Adat Papua terkait pelantikan

DPRP jalur Otsus kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Andi juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah merespons masalah tersebut dan akan segera mengadakan pertemuan dengan DPD RI. Untuk itu, pihaknya akan memanggil pihak Kemendagri untuk meminta kejelasan persoalan ini. “Sudah dikomunikasikan dengan pihak Kemendagri, sangat direspons cepat. Hari ini juga akan ada tim dari Kemendagri yang menangannya untuk menyampaikan aspirasi,” jelas senator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu. (*)

Senator Miliki Misi Diplomatik Perkenalkan Potensi Daerah

Kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-Soo untuk menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Minggu (20/10/2024), dimanfaatkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin un-

tuk melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin pemerintahan Korea Selatan tersebut.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di salah satu hotel di Kawasan Senayan, Jakarta, PM Korsel membawa serta 35 bawahannya, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri

Korea Kim Hong Kyun. Sementara itu, Sultan didampingi beberapa pengusaha yang tergabung dalam Kadin dan Apindo.

Pertemuan diplomatik ini dilakukan sebagai respons positif pasar dan dunia internasional terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Sultan menyata-



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (kedua dari kiri) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-Soo (ketiga dari kiri). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kan bahwa DPD RI secara kelembagaan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap memperhatikan prinsip *checks and balances*.

“Meski tidak mudah, target Pak Prabowo tersebut bisa tercapai jika kita semua bersedia bekerja sama membangun bangsa ini dengan menjaga persatuan nasional. Saya bahkan meminta agar semua anggota parlemen, khususnya anggota DPD RI, harus memi-



Ilustrasi: Ist

liki misi diplomatik untuk memperkenalkan potensi daerahnya kepada tamu dan investor asing,” tegas Sultan.

Kepada PM Korea Selatan, Sultan memperkenalkan wilayah Indonesia yang terdiri dari 508 daerah otonomi (415 kabupaten dan 93 kota) dengan 38 provinsi. Menurutnya, semua daerah tersebut memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan jumlah penduduk produktif yang penting sebagai modal pembangunan nasional. Selain itu, perekonomian Indonesia ditopang jutaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sementara Korea Selatan memiliki keunggulan dalam pengembangan *small enterprise*.

“Karena itu, Indonesia dan Korea Selatan perlu melakukan *business matching* secara rutin untuk menemukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah asal daerah dari kedua negara. Kolaborasi bisnis B to B pada level *small enterprise* sejauh ini belum *di-follow up* secara intensif dan masif,” kata Sultan, yang juga mengapresiasi dukungan Korea Selatan

melalui kerja sama strategis di bidang perdagangan dan investasi selama ini.

PM Korea Selatan pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Sultan sebagai Ketua DPD RI. “Kami mengundang kehadiran Ketua lembaga Senat Sultan untuk berkunjung ke Korea Selatan. Indonesia dan Korea perlu melakukan terobosan diplomatik, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan pendekatan kolaboratif,” ujarnya. (*)

Komite III DPD RI Minta Keadilan untuk Supriyani

Ramai diberitakan di media, seorang guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditahan karena diduga melakukan pemukulan terhadap seorang siswa yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar (SD). Diketahui bahwa orang tua siswa tersebut merupakan seorang anggota kepolisian berpangkat Aipda.

Kasus tersebut mendapat respons dari Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma. Ia meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru bagi seorang guru. “Kasus penahanan Supriyani harus diungkap secara transparan ke publik. Supriyani harus diperlakukan secara adil,” tegas Filep Wamafma, Selasa (22/10/2024).

Kasus dugaan pemukulan ini sudah berlangsung lama, yaitu sejak Rabu (24/4/2024). Supriyani sempat diminta untuk meminta maaf dengan datang ke rumah orang tua siswa tersebut, meskipun tidak merasa melakukan pemukulan terhadap siswa tersebut. Supriyani mengaku sempat dimintai uang Rp50 juta agar berdamai dan di-

minta untuk tidak mengajar kembali oleh orang tua siswa tersebut. Namun karena merasa tidak melakukan kesalahan, Supriyani tidak mau membayar uang damai tersebut.

Tiba-tiba ia mendapat panggilan sebagai terlapor di Polsek Baito pada Senin (29/4/2024). Pada pertengahan Oktober 2024, ia mendapat panggilan dari Kejari Konawe Selatan untuk dimintai keterangan atas peristiwa pemukulan siswa, tetapi meski tidak merasa melakukan pemukulan, ia kemudian tetap langsung ditahan oleh pihak Kejari.

Menurut Filep, peristiwa ini harus dijadikan pelajaran oleh semua pihak agar tidak mudah mengadukan masalah siswa di sekolah bahkan sampai melakukan persekusi dan mempidanakan seorang guru hanya karena dugaan pemukulan tanpa disertai saksi dan bukti yang kuat.

Ke depannya, ia berharap agar profesi guru lebih dihormati, dihargai, serta ditingkatkan status dan kesejahteraannya agar pen-

didikan di Indonesia menjadi lebih maju dan berkualitas. “Profesi guru harus lebih dihormati dan dihargai agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju dan meningkat,” lanjut Filep Wamafma.

Senator dari Papua Barat itu menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru sangat berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. (*)



Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pemerintah Perlu Antisipasi Potensi Konflik Pilkada 2024

Pada 27 November 2024 mendatang, bangsa Indonesia akan menggelar hajatan pesta demokrasi yang cukup besar, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota menggelar

pilkada. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pilkada digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten.

Karena itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin ter-

jadi dalam pilkada tersebut. “Kami perkirakan potensi persoalan dalam pilkada kali ini akan cukup serius dan kompleks, baik dalam tahapan proses persiapan, pemilihan, hingga hasil dan sengketa hasil,” kata Sultan, Rabu (23/10/2024).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta agar



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

persiapan dilakukan secara matang oleh pemerintah, terutama bagi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan. Dia meminta pemerintah dan penyelenggara untuk melaku-

kan inovasi mitigasi dampak sosial dan politik dari pilkada serentak ini. Suhu politik lokal biasanya lebih rentan dan lebih panas, meskipun geliat pesta demokrasi ini sangat penting bagi upaya



Ilustrasi: Ist

konsolidasi demokrasi Indonesia.

Sultan juga meminta semua elemen bangsa untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas politik lokal dan nasional secara damai dan sejuk. Pilkada serentak adalah ajang politik lokal yang sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah. “Kami sangat senang dengan geliat pesta demokrasi di daerah saat ini, yang sedikit banyak meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini tentunya penting bagi upaya meningkatkan kualitas indeks demokrasi lokal dan nasional,” jelasnya.

Meski demikian, kata Sultan, Pilkada Serentak 2024 belum sepenuhnya mampu mel-

hirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Dia menyebutkan bahwa pilkada serentak kali ini akan menjadi rujukan dan barometer bagi rencana kebijakan pilkada serentak di masa depan.

“Pilkada langsung belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi agenda kemandirian otonomi daerah. Artinya, dalam jangka panjang, pilkada langsung yang tidak efektif perlu dievaluasi secara bertahap,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Muhdi yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, berjanji akan mengawal kesuksesan Pilkada

2024 dengan melakukan kunjungan kerja ke KPU, Bawaslu, dan instansi lainnya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar. “Menjadi harapan kita agar pilkada yang diselenggarakan bisa berlangsung jujur, adil, demokratis, dan menghasilkan kepala daerah yang seperti kita harapkan,” jelas Muhdi.

Muhdi juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk benar-benar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi menegaskan bahwa komitmennya adalah menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga perlu diingatkan tentang pentingnya netralitas aparat. (*)

Senator Erni Daryanti Minta Pengawasan *Skincare* Diperketat

Maraknya penjual *skincare* (perawatan kulit) melalui media sosial dan penjualan *online* telah membuat pemasarannya semakin kuat. Dampaknya, banyak orang yang tertarik untuk membeli produk *skincare* setelah menerima *endorsement* dari para tokoh atau selebgram tanpa memperhatikan isi kandungannya.

Di kalangan pengguna *skincare*, dikenal istilah “mafia *skincare*” dan “*skincare* etiket biru,” yang mengacu pada produk *skincare* yang dijual di pasaran tanpa izin edar resmi dan melibatkan praktik ilegal yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Erni Daryanti (Kalimantan Tengah) mengingatkan masyarakat akan bahayanya penggunaan *skincare* yang dijual tanpa izin edar resmi dan mengandung bahan merkuri yang berbahaya.

“Penggunaan *skincare* tanpa izin edar resmi dan yang mengandung zat berbahaya sangat merugikan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Risiko kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan *skincare* tanpa izin edar sama besarnya dengan risiko dari penggunaan *skincare* yang

mengandung bahan berbahaya,” papar Erni Daryanti, Jumat (25/10/2024).

Sebagai seorang dokter kecantikan, Erni Daryanti berpesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan produk *skincare*. Ia menyarankan agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih *skincare*. Dia menganjurkan untuk menggunakan produk *skincare* yang memiliki kandungan aman dan sudah mendapatkan sertifikat BPOM.

Ia mengutip data hasil pengawasan BPOM pada tanggal 19-23 Februari 2024 terhadap sarana klinik kecantikan.

Dari 731 klinik kecantikan yang diperiksa, ditemukan

239 sarana klinik kecantikan atau 33% tidak memenuhi ketentuan. Karena itu, dia meminta agar pemerintah dan BPOM lebih meningkatkan pengawasan atas segala bentuk pemasaran dan peredaran *skincare* yang berbahaya dan merugikan masyarakat.

“Kami meminta pihak pemerintah dan BPOM agar meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pemasaran dan peredaran *skincare* yang tidak memiliki izin edar resmi, mengandung bahan berbahaya, dan melakukan *overclaim*,” kata Wakil Ketua Komite III DPD RI itu. (*)



Anggota DPD RI Erni Daryanti
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Program Transmigrasi Bukan Solusi Atasi Kesejahteraan Masyarakat Papua

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Papua Tengah Lis Tabuni, menilai program transmigrasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi bukan merupakan solusi dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

“Ada sejumlah sektor utama lain yang lebih mendesak atau urgen untuk dikerjakan pemerintah melalui kementerian dan lembaga, terkait masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Transmigrasi berpotensi membuat masyarakat asli Papua terasingkan dari tanah leluhur mereka bahkan terpinggirkan dalam usaha meraih kesejahteraan,” kata Tabuni dikutip dari *Odiyaiwuu.com*, Jumat (25/10/2024).

Menurut Lis, tanah Papua menyimpan persoalan yang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui transmigrasi sebagai juru selamat kesejahteraan. Malah sebaliknya, transmigrasi akan menuai konflik di tingkat masyarakat adat jika lahan ulayat digunakan atas nama transmigrasi.

“Saya melihat akan ada banyak potensi masalah yang dapat menyulut konflik ko-

munal, tidak hanya di antara masyarakat lokal tetapi juga warga transmigran yang tinggal di lokasi transmigrasi,” ujar Wakil Ketua Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI.

Selain itu, senator perempuan asli Papua ini juga mengatakan bahwa banyak gejala dari berbagai kelompok akan muncul ketika program transmigrasi dilaksanakan. Karena itu, ia meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk serius mempertimbangkan psikologi masyarakat lokal yang sudah hidup dalam soliditas kultur yang terawat selama ini.

Diketahui bahwa Instruksi Presiden kepada Kementerian Transmigrasi mendorong transmigrasi ke tanah Papua dengan alasan

pemerataan pembangunan atas nama kesejahteraan dan bagian dari upaya menjaga keutuhan NKRI. Namun, hal ini bukanlah salah satu program yang efektif dan merupakan solusi bagi masyarakat tanah Papua.

Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan bahwa kementerian akan melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia timur, khususnya Papua. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraan, persatuan nasional, dan dalam konteks yang lebih besar. (*)



Anggota DPD RI Lis Tabuni
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melepaskan tembakan air pada pembukaan outbound. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Membangun Kerja Sama Tim Anggota DPD RI Ikuti *Outbound*



Para senator sedang melakukan permainan untuk melatih kekompakkan dan kerja sama. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengikuti kegiatan *outbound*, yaitu permainan di luar ruangan untuk melatih keterampilan dan meningkatkan kerja sama tim, yang berlangsung selama dua hari di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pemanjapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lemhannas. Kegiatan ini diisi dengan *team building* dan pemanjapan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada peserta

tentang nilai-nilai kebangsaan secara nyata dalam bentuk simulasi. Setiap tantangan memberikan pengalaman kepada peserta untuk merasakan wujud perilaku dari nilai-nilai tersebut.

Sultan B Najamudin dalam sambutannya, menyatakan bahwa kegiatan *outbound* ini dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan memancarkan nilai-nilai nasionalisme, di mana kerja sama dan *team-work* antar anggota DPD RI terbentuk melalui kegiatan tersebut. “Yang utama adalah kolaborasi, yang menjadi kata kunci saat ini, karena kekuatan lembaga

kita terletak pada kolaborasi antar anggota,” ucap Sultan.

Senada dengan Ketua DPD RI, Mayor Jenderal TNI Rido Hermawan, selaku Deputy Kebangsaan Lemhannas, menekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah strategis, diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik antar anggota. Jika tidak ada kesungguhan, fokus, dan komitmen dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka masalah tersebut tidak akan teratasi. “Kegiatan *team building* ini diharapkan dapat membangun kolaborasi yang baik untuk anggota DPD RI,” ujar Rido. (*)



Para senator yang mengikuti *outbound*. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Program Makan Bergizi Gratis Sangat Penting dan Mendesak

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menilai bahwa program makan bergizi gratis sangat penting dan mendesak dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Sultan mengibaratkan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu seperti memupuk tanaman pada masa pertumbuhan. Tanaman yang ditanam dengan bibit unggul, lalu dipupuk secara teratur dan seimbang, akan menghasilkan buah yang berkualitas dan bernilai jual tinggi.

“Kami percaya bahwa masa depan suatu bangsa sangat terkait erat dengan pendekatan kebijakan terhadap sumber daya manusianya saat ini. Kuantitas demografi yang tidak ditumbuhkan dengan pendekatan nutrisi yang

cukup akan menjadi beban bagi pembangunan SDM suatu bangsa,” ujar Sultan, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, lanjut Sultan, program makan bergizi gratis berpotensi menjadi sumber ekonomi baru di daerah. Dia melihat adanya peluang efek berganda yang dapat menumbuhkan geliat ekonomi pada sektor pertanian dan pangan di desa.

“Kami berharap agar program kerakyatan ini diintegrasikan dengan program Kemandirian Pangan dan Energi Nasional. Agar para pelaku usaha tani dapat dijadikan pemasok be-

ras, sayuran, daging, telur, dan susu untuk mendukung pelaksanaan program tersebut,” tegasnya.

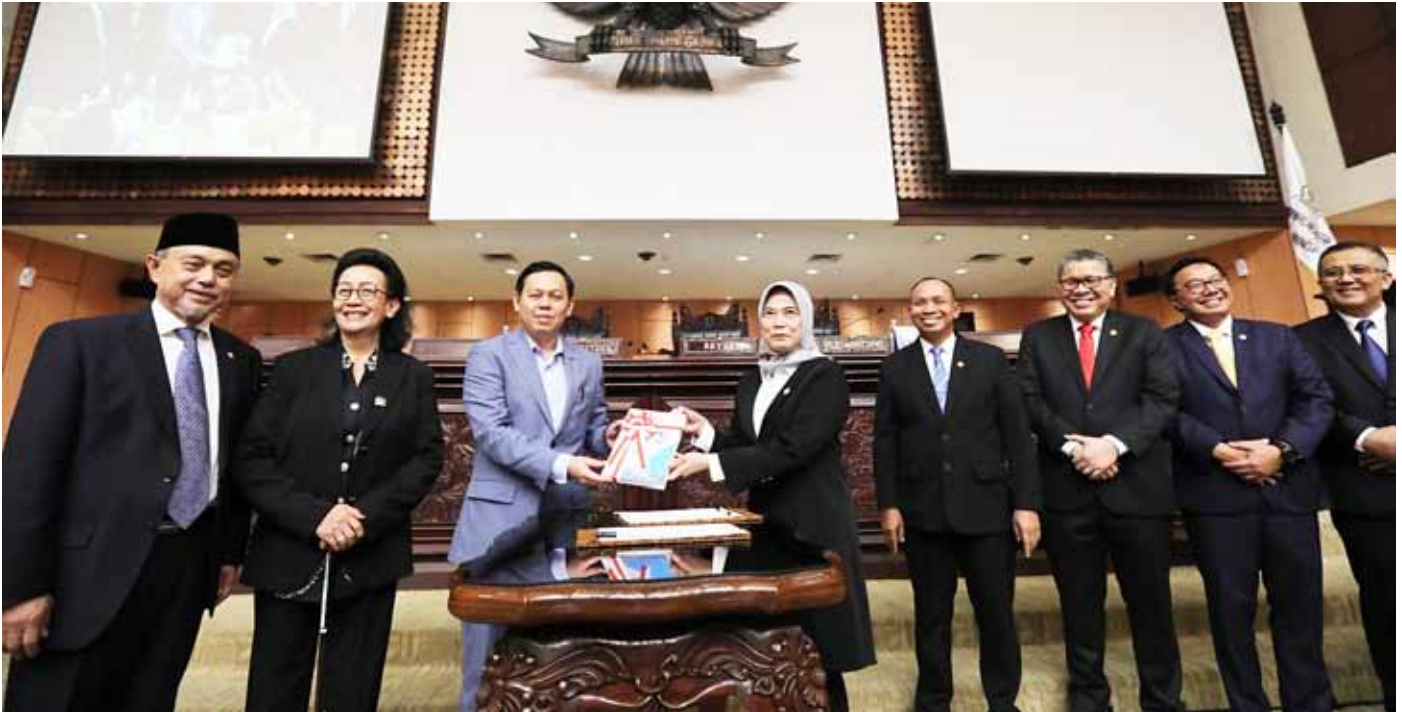
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan bahwa anggaran puluhan triliun untuk program makan bergizi gratis yang mengalir hingga ke desa akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Artinya, akan ada jutaan peluang kerja baru yang dapat dikembangkan secara masif.

“Investasi pada kualitas SDM sejak dalam kandungan ibu adalah prasyarat agar bangsa ini mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Insyallah, di usia emas Indonesia nanti, kita akan memanen SDM dengan kualitas premium berkat program sederhana yang kita tanam saat ini,” tutupnya. (*)



Ilustrasi seorang anak SD sedang mencoba makan siang bergizi gratis. (Foto Antara.com)

DPD RI Terima IHPS Tahun 2024 dari BPK RI



(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2024 serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Sidang Paripurna ke-7 DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). DPD RI menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pemeriksaan terhadap 546 LKPD Tahun 2023 yang mengungkap kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan, serta komitmen aparatur untuk meningkatkan akuntabilitas.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan

agar cakupan pemeriksaan BPK RI diperluas untuk hasil yang lebih optimal. Sultan juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran BPK RI guna mendukung kinerja yang lebih baik. Sidang tersebut dipimpin oleh Sultan bersama Wakil Ketua GKR Hemas dan Tamsil Linrung.

Pimpinan DPD RI menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Hasil pemeriksaan yang mengindikasikan kerugian negara akan dilimpahkan ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) untuk penelaahan dan tindak lanjut.

Ketua BPK RI Isma Yatun

melaporkan bahwa IHPS I Tahun 2024 merangkum 738 laporan hasil pemeriksaan yang diselesaikan BPK, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, dan 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Sebanyak 549 LHP tersebut melibatkan pemeriksaan atas laporan keuangan pemda dan BUMD.

Isma Yatun mengapresiasi komitmen kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dengan tingkat penyelesaian mencapai 78,4 persen sejak 2005. Ia berharap DPD RI mengoptimalkan perannya dalam pengawasan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di daerah. (*)

BULD DPD RI Tetapkan Sasaran Pemantauan Perda

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat pleno dengan agenda membahas penetapan sasaran pemantauan rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) serta program kerja tahun sidang 2024-2025, Rabu (16/10/2024). Rapat dipimpin Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N Liow, didampingi Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa (Kalimantan Utara), Abdul Hamid (Riau) dan Agita Nurfianti (Jawa Barat).

“Setelah melalui hasil diskusi seluruh anggota BULD DPD RI dan mengingat urgensi yang terjadi di daerah, maka telah kami putuskan ranperda dan perda yang menjadi fokus sasaran pemantauan untuk program kerja tahun sidang 2024-2025, yaitu yang terkait masyarakat hukum adat serta terkait tata kelola pemerintahan desa,” kata Stefanus.

Stefanus mengatakan pada tahun sidang 2024-2025 ini, BULD DPD RI juga memberikan rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi Ranperda



Pimpinan BULD DPD RI (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dan Perda tentang implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah terkait kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah.

Selain memberikan rekomendasi mengenai rencana tata ruang wilayah, BULD DPD RI juga menindaklanjuti hasil pemantauan terkait Ranperda dan Perda tentang Ketahanan Pangan. Selanjutnya BULD DPD RI akan memanggil kementerian terkait untuk menyelesaikan temuan tersebut,” ujar senator asal Sulawesi Utara tersebut.

Senada dengan Stefanus, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ni Luh

Djelantik mengatakan bahwa ranperda dan perda mengenai masyarakat hukum adat tepat untuk dijadikan fokus sasaran pemantauan karena masih menjadi polemik masyarakat di berbagai daerah, terutama di Bali. Dirinya juga membahas peran DPD RI dalam meng-evaluasi perda.

“Dalam peran DPD RI sebagai evaluasi atas perda yang berjalan, kita harus ambil langkah konkret agar setiap kita ke daerah dan melihat ada aturan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, agar menjadi teguran kepada kepala daerah untuk langsung dilakukan perbaikan,” pungkas Ni Luh. (*)

BKSAP Tindaklanjuti *LoI* dengan Ceko Soal Perlindungan Lingkungan Hidup



Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman bersalaman dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menggelar rapat dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek, untuk menindaklanjuti *Letter of Intent (LoI)* tentang Kerja Sama Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko yang ditandatangani pada 2021 silam.

LoI ini mencakup berbagai area kerja sama, seperti ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, perubahan

iklim, perlindungan air dan pengolahan limbah, serta pelestarian satwa liar. Melalui rapat tersebut, diharapkan dapat menggali lebih dalam potensi kolaborasi yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi kedua negara.

“Tindak lanjut dari *LoI* ini sangat penting untuk memastikan bahwa kerja sama kita tidak hanya berada di level kebijakan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata di lapangan, terutama bagi provinsi-provinsi di Indonesia yang membutuhkan solusi berkelanjutan untuk tantangan lingkungan,” kata

Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dengan komitmen yang kuat dari kedua pihak, Gusti yakin kerja sama ini akan semakin mengukuhkan hubungan Indonesia dan Republik Ceko. Dari rapat kerja ini, diharapkan menemukan solusi yang bisa diimplementasikan bersama di tingkat nasional maupun daerah serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup di masa depan.

Dalam rapat tersebut, sena-



Pimpinan dan anggota BKSP DPD RI bersama Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tor asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mempertanyakan sistem pengelolaan sampah yang berjalan baik di Republik Ceko. “Saat ini permasalahan sampah di Jawa Tengah masih menjadi masalah lingkungan utama. Saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana *burning system* berjalan baik selama ini di Republik Ceko,” tanyanya.

Senada dengan Denty, Senator asal Daerah Khusus Jakarta Happy Djarot berharap ada kerja sama dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi dari Ceko untuk mengelola sampah di Jakarta. “Masalah sampah dan krisis air bersih berdampak serius dengan kasus stunting anak di Jakarta sehingga saya berharap ada kerja sama di bidang pengelolaan sampah berbasis teknologi yang bisa

diadopsi sistemnya oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta,” ucapnya.

Terkait kerja sama perlindungan lingkungan hidup, Anggota DPD RI asal Maluku Utara Sultan Hidayat M. Sjah meminta tanggapan Duta Besar Republik Ceko mengenai kerusakan hutan yang banyak terjadi di Indonesia. “Bagaimana pendapat anda mengenai banyaknya kerusakan hutan di Indonesia, dan adakah upaya kerjasama yang dilakukan?” kata Sultan Hidayat.

Menanggapi hal tersebut, Jaroslav Dolecek menjelaskan, negaranya telah mengadopsi pengelolaan sampah dengan *burning system* yang memanfaatkan panas bumi untuk mengelola sampah dengan tenaga uap. Pemerintah Republik Ceko juga membangun tempat penge-

lolan sampah di dekat rumah sakit untuk mengelola sampah medis yang dianggap berbahaya. Jaroslav pun membuka peluang kerja sama dengan Indonesia terkait pengelolaan sampah sehingga tidak membawa dampak negatif ke lingkungan.

“Adapun upaya kami atas kerja sama pengelolaan sampah di Indonesia yaitu kami siap untuk melakukan transfer teknologi, salah satunya jika ada pelaku industri yang tertarik mengelola sampah menjadi *furniture*. Pemerintah Republik Ceko juga terus meningkatkan kerja sama berupa pembangunan *sister city* yang sebelumnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya dengan Provinsi Bali karena kami sangat tertarik dengan keindahan Ubud,” jelas Jaroslev.(*)

Audiensi ke Komite III, KTKI Adukan Kemenkes

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) mengadu ke Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jumat (18/10/2024). Mereka diterima langsung oleh Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma. Mereka mengadukan Kementerian Kesehatan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, dan melakukan proses seleksi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertentangan dengan prinsip *good public governance*.

Perwakilan KTKI Rachma Fitriati menyampaikan beberapa pelanggaran yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Pertama, adanya penghentian kegiatan KTKI secara sepihak. Pada minggu ketiga bulan September 2024, Plt Sekretaris KTKI menghentikan seluruh kegiatan dan anggaran KTKI, meski KTKI merupakan lembaga independen. “Penghentian ini berdampak pada pelayanan publik dan validasi e-STR (Surat Tanda Registrasi), yang menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelasnya.

Kedua, anggota KTKI diminta berhenti dari pekerjaan dan harus berdomisili di Jabodetabek sejak September 2022. Penghentian mendadak tersebut menyebabkan anggota KTKI kehilangan



Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma bersama sejumlah perwakilan KTKI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pekerjaan. Ketiga, pelantikan pimpinan KKI dilakukan setelah proses seleksi yang tidak transparan. Ketua KKI yang terpilih adalah anggota panitia seleksi, sehingga terjadi konflik kepentingan.

“Keempat, anggota KTKI tidak diberikan kesempatan menyelesaikan tugas dan membuat laporan pertanggungjawaban, yang seharusnya merupakan bagian dari amanah negara. Dan, kelima adalah adanya pelanggaran prosedur dan hak,” jelasnya.

Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma berjanji akan menindaklanjuti aduan tersebut. Komite III DPD RI akan mengkaji data dan laporan aduan terkait dugaan kebijak-

an pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang mengakibatkan adanya tumpang tindih dengan peraturan lain dan diduga merugikan orang lain.

“Kami akan segera membahasnya pada agenda kerja Komite III. Mudah-mudahan Komite III bisa menjadi sarana aspirasi suara rakyat untuk turut serta memperjuangkan dan ada realisasinya, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut,” ucap senator dari Papua Barat ini dan menambahkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, Komite III DPD RI akan berkoordinasi dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk dilakukan mediasi antara pihak-pihak yang bertikai. (*)

DPD RI Sosialisasikan Tata Kelola JDIH di Riau

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan sosialisasi tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pekanbaru, Riau, baru-baru ini. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan tugas anggota JDIH dalam penataan dokumen dan keterbukaan informasi hukum.

Kepala Pusat Perencanaan dan Kajian Kebijakan Hukum Setjen DPD RI Andi Erham menjelaskan tujuan sosialisasi ini untuk memperluas jaringan kerja sama anggota JDIH Nasional. Dengan kegiatan itu, diharapkan memperkuat pertukaran informasi, dinamika, dan tantangan pengelolaan JDIH DPD RI maupun JDIH di wilayah Riau.

“DPD RI sedang melakukan pembenahan untuk menjadikan JDIH lebih inovatif. Langkah ini mencakup pembentukan perpustakaan mini hukum, ruangan informasi hukum, serta penyusunan peraturan Sekjen DPD RI tentang pengelolaan JDIH,” pungkas Andi.

Kepala Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Jonny Pesta Simamora, menekankan pentingnya penguatan JDIH melalui kebi-



Kepala Pusat Perencanaan dan Kajian Kebijakan Hukum Setjen DPD RI Andi Erham menyerahkan cendera mata kepada Kepala Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Jonny Pesta Simamora. (Foto BPHN)

jakan terarah dan terintegrasi. “Kami berkomitmen meningkatkan kualitas dokumen hukum, pengelolaan JDIH, dan inovasi layanan,” ujarnya di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi.

Jonny juga menegaskan pentingnya memiliki sistem dokumentasi efektif agar produk hukum mudah diakses publik dan berfungsi sebagai alat bantu pengembangan kebijakan serta pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau, Zulkifli

Syukur, yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Riau, menyoroti tantangan keterbukaan informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi meningkatkan transparansi, namun juga menimbulkan tantangan dalam membedakan informasi valid.

“Pendidikan literasi digital penting untuk membantu masyarakat mengambil keputusan lebih baik terkait informasi yang dikonsumsi,” ujar Zulkifli. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan yang digelar ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih berbudaya dan sadar hukum. (*)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima penghargaan dengan kategori *Excellence In Empowering Local Representatives for Equality* pada acara *Rep-nas National Conference & Awarding Night: Energi Mandiri - Ekonomi Berdikari*, di Auditorium Menara Bank Mega, Senin (14/10/2024). Sultan foto bersama dengan sejumlah anggota DPD RI usai menerima penghargaan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota DPD RI Maya Olivia Rumantir (Sulawesi Utara) mendapat penghargaan dari We Care for Humanity (WCH), Rabu (23/10/2024) di Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua WCH Mariam Leonor Torres Mastura. Juga terlihat hadir anggota DPD RI Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan) dan Darmansyah Husein (Bangka Belitung). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Keceriaan para senator atau anggota DPD RI saat mengikuti *outbound*, dalam rangkaian kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Memahami Kepemimpinan Presiden Prabowo

Oleh:
Irman Gusman

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto semakin dikenal sebagai seorang patriot sejati. Dalam pidato perdananya di hadapan 19 kepala negara dan 15 utusan khusus dari negara-negara sahabat, ia menyroti kondisi riil bangsa Indonesia, menggambarkan realitas yang lebih dari sekadar angka statistik. Dengan tegas, ia mengungkapkan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan, masih ada yang harus bekerja keras di usia lanjut, dan masih banyak sekolah yang rusak. Baginya, Indonesia harus bebas dari kemiskinan dan penderitaan, dan rakyat harus hidup tanpa rasa takut.

Keterusterangan ini menandakan keberanian seorang pemimpin yang tidak menutupi kekurangan. Prabowo ingin agar kemajuan bangsa diukur dari lapisan bawah, tempat mayoritas penduduk tinggal. Sikap ini mengharuskan seluruh jajaran kabinetnya untuk berani menghadapi kenyataan sosial yang ada dan mencari solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang masih menekan bangsa. Ia



menyerukan agar para pemimpin tidak seperti burung unta yang menyembunyikan kepala saat menghadapi masalah.

Prabowo juga menanamkan kejujuran dan sportivitas dengan mengakui prestasi presiden-presiden sebelumnya. Ia menghargai Soekarno sebagai pendiri negara dengan dasar Pancasila dan Soeharto sebagai pemimpin pembangunan. Prabowo juga memuji BJ Habibie yang membuka kran demokrasi dan berkomitmen pada pengembangan IPTEK, Gus Dur sebagai pelopor toleransi, serta Megawati yang berhasil mengatasi krisis ekonomi dan membela wong cilik.

Tidak berhenti di situ,

Prabowo juga mengakui kepemimpinan SBY sebagai pemimpin yang berhasil menyelesaikan konflik di Aceh, meningkatkan kesejahteraan, serta menempatkan Indonesia di peta dunia. Ia pun menghormati capaian Presiden Jokowi yang membawa Indonesia keluar dari krisis Covid-19 dan memajukan pembangunan infrastruktur serta memulai pemindahan ibu kota.

Tindakannya untuk merangkul berbagai tokoh yang dulu kurang bersahabat menunjukkan sikap patriotik yang berwawasan luas. Langkah ini mencerminkan kebesaran jiwa seorang pemimpin yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau partainya. Prabowo ingin membuktikan bahwa loyalitas pada bangsa dan negara harus selalu lebih tinggi daripada loyalitas pada kelompok politik.

Dalam pidatonya, ia juga menyentil masalah kebocoran anggaran negara, korupsi, dan kolusi, dengan nada yang mengingatkan pada nasihat ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo,

yang pernah berbicara tentang kebocoran APBN. Prabowo memberikan ultimatum kepada semua jajaran pemerintahannya untuk tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN. Ia berharap menjadi teladan, karena dirinya sudah selesai dengan kepentingan pribadi.

Contohnya adalah ketika krisis 1998 melanda, Prabowo menolak restrukturisasi utang perusahaannya di Bank Mandiri, menunjukkan prinsip kuat untuk tidak merugikan negara. Prabowo membuktikan pengabdianya tidak hanya di medan perang, tetapi juga di sektor ekonomi demi bangsa dan negara. Sikapnya ini menjadi teladan bagi seluruh pejabat negara agar senantiasa menjaga integritas.

Di usianya yang ke-73, Prabowo bertekad untuk mencapai target ambisius seperti swasembada pangan dan energi dalam 4-5 tahun. Ia menyoroti bahwa negeri ini sangat kaya, dan apabila rakyat masih miskin, hal ini menandakan adanya salah kelola. Mengutip Peter Drucker, *“There’s no underdeveloped country, only undermanaged ones,”* Prabowo ingin memimpin perubahan besar-besaran dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan paradigma baru, ia mengajak bangsa untuk berani mengakui kekurangan dan menyele-

saikan masalah bersama. Prabowo menekankan bahwa data statistik tidak seharusnya digunakan hanya untuk pencitraan, tetapi harus mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Ia menginginkan perubahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kejujuran dalam penyampaian data.

Ia juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berakar pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi yang dibayangkannya adalah demokrasi yang menjaga kesatuan, menghindari konflik dan kebencian, dan memperkuat persatuan bangsa.

Pesan politik ini mencerminkan cita-cita untuk membawa demokrasi Indonesia ke jalur yang seharusnya, sesuai dengan budaya bangsa. Demokrasi ala Indonesia, menurut Prabowo, harus menghindari pola liberal yang seringkali hanya menambah perselisihan dan menimbulkan gesekan.

Indonesia harus bangga dengan nilai-nilai persatuan yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dalam momentum peringatan ke-96 tahun Sumpah Pemuda, Prabowo menyerukan agar bangsa Indonesia terus merawat jati diri sebagai bangsa yang bersatu.

Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan, sebab “ikan busuk mulai dari kepalanya.” Keteladanan di pucuk pimpinan akan memberi arah dan semangat bagi seluruh rakyat. Prabowo berharap, bangsa ini akan lebih maju dan sejahtera, dengan setiap pemimpin menjalankan tugas dengan penuh integritas.

Prabowo juga mengingatkan pengalamannya di masa muda saat melihat tulisan diskriminatif di kolam renang Manggarai yang melarang “*inlander* dan anjing” masuk. Pengalaman tersebut membakar semangatnya untuk mengangkat martabat bangsa, dan ia terus bertekad mengubah stigma-stigma buruk tentang Indonesia.

Kini saatnya Prabowo membuktikan tekadnya. Dengan membentuk Kabinet Merah Putih, ia melibatkan berbagai tokoh untuk memperkuat barisan. Dengan strategi matang, ia bertekad membuat perubahan demi mengangkat derajat bangsa di mata dunia. Kita berharap dan mendoakan agar Prabowo sukses memimpin Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, dan sejahtera.

**)Penulis adalah ketua
DPD-RI 2009-2016/Senator
RI – Sumatera Barat
2024 – 2029*

EMPAT DESTINASI PALING DICARI DI KOTA PAHLAWAN SURABAYA

Four Most Sought After Destination in Heroes City Surabaya

1 Tugu Pahlawan / Heroes Monument

Adalah monumen ikonik di Surabaya yang berdiri untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya dalam Pertempuran 10 November 1945 melawan penjajah. Tugu setinggi 41,15 meter ini berbentuk lingga dengan desain khas yang melambangkan semangat perjuangan. Di sekitar area monumen, terdapat Museum 10 November yang menyimpan koleksi bersejarah berupa foto, dokumen, dan artefak perjuangan. Destinasi ini mengajak pengunjung untuk menyelami



Foto ist

sejarah, sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

It is an iconic monument in Surabaya to commemorate the fight of the sons of Surabaya in 10 November 1945 battle against the colonialist. The 41.15 meter-height monument is an obelisk shape with special design which depicts the courage of fighting. Surrounding the monument area is 10 November Museum which has historical collections like photos, documents, artifacts of struggle. This destination invites visitors to dive deep into history and at the same time express appreciation to the service of the heroes who have fought for the independence of Indonesia.

2 House of Sampoerna

Adalah museum tembakau yang menyajikan perjalanan panjang industri rokok kretek Sampoerna di Indonesia. Berlokasi di bangunan bergaya kolonial Belanda yang indah, museum ini menampilkan proses pembuatan rokok secara tradisional hingga peran industri ini dalam budaya lokal. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi antik, mesin pembuat rokok, dan galeri yang menceritakan sejarah keluarga Sampoerna. Tempat ini menawarkan



Foto Atourin.com

pengalaman unik untuk memahami sejarah bisnis kretek, serta sentuhan budaya yang melekat di dalamnya.

It is a tobacco museum which displays the long industrial journey of Sampoerna Kretek Cigarettes in Indonesia. Housed in a gorgeous Dutch-colonial-style building, the museum displays traditionally cigarette-making process up to the role of the industry in local culture. Within the compound visitors can observe various antique collections, cigarette-making machines, and a gallery which tells the history of the Sampoerna family. The place offers a unique experience to comprehend the history of kretek cigarette business, and the inherent cultural touch within.

3 Kebun Binatang Surabaya / Surabaya Zoo

Merupakan salah satu kebun binatang tertua dan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki beragam koleksi satwa. Berbagai spesies hewan, mulai dari mamalia, reptil, hingga burung-burung eksotis dapat ditemukan di sini. Tempat ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi bagi keluarga, tetapi juga pusat edukasi yang mengajarkan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Kebun Binatang Surabaya menyediakan fasilitas edukatif, seperti papan in-



formasi dan jadwal interaksi satwa, sehingga pengunjung dapat lebih mengenal dunia fauna dengan menyenangkan.

It is one of the oldest and biggest zoos in South East Asia which possesses diverse animal collection. Various animal species, from mammals, reptiles, to exotic birds can be found here. It is not only a nice recreational place for families, but also it serves as an education center which exerts the importance of keeping bio diversity in nature. Surabaya zoo provides educative facilities such as information board and interactive schedule of the animals, in order that visitors can get a better knowledge about animal kingdom in a more fun way.

4 Hutan Bambu Keputih / Keputih Bamboo Grove

Ini adalah tempat wisata alam di Surabaya yang menenangkan dengan barisan pohon bambu yang rindang. Awalnya area bekas tempat pembuangan akhir, Hutan Bambu Keputih kini disulap menjadi taman yang hijau dan asri, mirip dengan suasana Arashiyama Bamboo Grove di Jepang. Suasananya yang sejuk dan fotogenik menjadikan tempat ini favorit untuk bersantai dan berfoto. Di samping hutan bambu, terdapat Taman Harmoni yang penuh bunga warna-warni, menambah daya tarik



Foto Nahwa Travel

bagi para wisatawan yang ingin melepas penat dan menikmati keindahan alam di tengah kota.

It is a natural tourism site in Surabaya which is tranquil with its stretch of shady bamboo trees. Originally a final dumping area, Keputih Bamboo Grove is wonderfully transformed into a green and beautiful park similar to the ambient in Arashiyama Bamboo Grove in Japan. The ambient is cool and Instagrammable which makes the site a favorite place to relax and take pictures. Besides the bamboo grove there is Harmony Garden which is filled with multi-colored flower plants, as it enhances the attraction to tourists who are there relaxing and enjoying the beauty of nature in the center of the city.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Selamat
**HARI
PAHLAWAN**

**BANGSA YANG BESAR
BANGSA YANG MENGHARGAI
PAHLAWAN**

10 November 1945 - 10 November 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

